



KEJAR TARGET PAD RP 1 TRILIUN

Pemkot Gencarkan Digitalisasi Genjot Pendapatan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menggenjot digitalisasi keuangan untuk menggenjot sektor pendapatan daerah. Apalagi sudah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif untuk mengejar target Rp 1 triliun untuk pendapatan asli daerah (PAD) paling lambat pada tahun depan.

Digitalisasi keuangan yang dimotori oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogya salah satunya dengan penyediaan layanan QRIS sebagai metode pembayaran kewajiban ke kas daerah.

"Metode pembayaran ke kas daerah menggunakan QRIS sudah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mendukung transaksi nontunai. Penggunaannya juga akan terus

diperluas," ungkap Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, Senin (30/9).

Menurut Sugeng, pada tahun 2023 lalu total PAD yang berhasil diraih Kota Yogya mencapai sekitar Rp 803 miliar atau 115 persen dari target. Tanpa harus menunggu tahun depan, bukan tidak mungkin PAD tahun ini bisa menembus Rp 1 triliun. Semakin besar capaian PAD yang diraih maka kemandirian daerah dalam melakukan pembangunan bisa terwujud. Hal ini karena daerah tidak lagi banyak bergantung pada transfer keuangan dari pusat.

"Untuk mengejar target PAD mencapai Rp 1 triliun, kita memiliki tantangan memaksimalkan potensi baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan

inovasi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien tentu harus diapresiasi," tandasnya.

Kepala BPKAD Kota Yogya Rr Andarini, menjelaskan sewa aset sangat berpeluang untuk dapat diekstensifikasi guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Pihaknya juga sudah menelurkan inovasi metode QRIS untuk kepentingan pembayaran sewa aset. Sewa aset daerah yang dimaksud seperti penggunaan gedung, tanah dan fasilitas milik pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang signifikan. "Digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan hanya soal mempermudah pembayaran, namun juga soal transparansi dan akuntabilitas. Melalui QRIS sewa aset yang sudah kami luncurkan pekan lalu,

harapannya proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu dapat disederhanakan menjadi lebih praktis dan efisien sehingga memudahkan masyarakat," urainya.

Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital, catatan transaksi dapat tercatat secara lebih baik. Selain itu mampu meminimalisasi potensi kesalahan maupun kebocoran, dan memungkinkan pemerintah untuk melakukan monitoring secara realtime. Andarini mengungkapkan dengan menggunakan QRIS sewa aset, masyarakat dapat memanfaatkan aset-aset milik daerah dengan melakukan pembayaran secara cepat dan aman melalui telepon seluler. Sistem dapat diakses mulai 1 Oktober 2024 untuk kategori lapangan dan

gedung olahraga.

Di samping menggenjot digitalisasi dalam metode pembayaran ke kas daerah, BPKAD Kota Yogya juga rutin memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah tertib dan taat menunaikan kewajibannya. Salah satunya terhadap wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memiliki transaksi pembayaran terbesar secara digital. Penghargaan ini diberikan kepada PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Bank Indonesia DIY dan H-Boutique Hotel. Dengan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dan aktif bertransaksi secara digital, akan tercipta budaya baru di masyarakat yang lebih terbuka terhadap teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka," jelas Andarini. (Dhi-d)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005